DAFTAR PUSTAKA

Referensi / Buku:

Boedi Harsono, 1999. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan)

Harsono Boedi, 2000. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum*, Jakarta: Djambatan.

Husein, Ali, Sofwan. 1995. *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Moleong, Lexy 1993. *Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta,* Rosdakarya.

Miles B. Mattew dan Huberman A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta : Universitas Indonesia.

Mudjiono, 1997. *Politik dan Hukum Agraria*, Yogyakarta: Liberty.

Perangin, Effendi, *1987. Praktik Jual Beli Tanah*, Jakarta: Raja Wali Pers.

Saleh, K. Wantjik, S.H. 1977. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Setia Hadi, *Dalam PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,* Jakarta, Harvindo.

Satri J,1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya.

Soedjendro, J, Kartini. 2001. *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik,* Yogyakarta, Kanisius.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 24 tahun 1997

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub

Bagian Seksi dan Urusan Serta Sub Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 Tanggal 19 Juli 2000 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Uraian Tugas Sub Seksi Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan uraian tugas Sub Bagian, Seksi dan urusan serta Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok